P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PENGARUH KINERJA KEUANGAN, TRANSPARANSI ANGGARAN, DAN *DEBT TO INCOME* TERHADAP *FINANCIAL SUSTAINABILITY*

Annisa Tri Hapsari[1)], Nelly Masnila[2)], Indra Satriawan[3)]
[1,2,3)] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email:annisatrihapsari111204@gmail.com [1)]

Abstrak

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan, Transparansi Anggaran dan *Debt to Income* (DTI) terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Populasi penelitian mencakup 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2020-2024 dengan total 170 sampel amatan. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel melalui bantuan program Eviews versi 13. Hasil pengujian parsial mengindikasikan bahwa Kinerja Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* atau Keberlanjutan Keuangan. Sebaliknya, Transparansi Anggaran dan *Debt to Income* (DTI) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Sustainability* dalam penelitian ini.
Kata Kunci: *Financial Sustainability, Kinerja Keuangan, Transparansi Anggaran, Debt to Income*

Abstract

This study was conducted to analyze the influence of Financial Performance, Budget Transparency, and Debt to Income (DTI) on Financial Sustainability in Provincial Governments in Indonesia. The research population covers 34 Provincial Governments in Indonesia over the 2020–2024 period, with a total of 170 observations. The sampling technique used in this study is the purposive sampling method. Data analysis in this study uses Panel Data Regression with the assistance of the Eviews version 13 program. The partial test results indicate that Financial Performance has a positive and significant effect on Financial Sustainability. Conversely, Budget Transparency and Debt to Income (DTI) show no significant effect on Financial Sustainability in this study.
Keywords: *Financial Sustainability, Financial Performance, Budget Transparency, Debt to Income*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan tetap menjaga kondisi keuangan yang sehat (Miftahurrohman & Prasetya, 2024), sebagaimana diamanatkan Utndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi keuangan yang sehat tercermin dari tercapainya Financial Sustainability, yaitu kemampuan pemerintah memelihara atau meningkatkan pelayanan publik secara kuantitas dan kualitas, baik saat ini maupun di masa depan (Bulan et al., 2023; Saferi & Sari, 2024).

Krisis pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 memberikan tekanan besar terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. Kebijakan penataan ulang alokasi anggaran menyebabkan rasio kemandirian keuangan 34 provinsi di Indonesia turun ke titik terendah 45,26% pada 2020 (BPK RI). Meski membaik menjadi 55,05% (2022) dan 57,55% (2023), angka ini masih berada pada kategori "sedang/partisipatif" (Mahmudi, 2019), menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat. Perkembangan yang belum sepenuhnya stabil ini memperkuat urgensi untuk mengkaji

faktor penentu Financial Sustainability pemerintah provinsi secara lebih komprehensif. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian ini diposisikan untuk mengisi tiga kesenjangan. Pertama, kesenjangan metodologis, maksudnya penelitian terdahulu umumnya menguji faktor

yang memengaruhi Financial Sustainability secara parsial atau hanya menggabungkan dua variabel, sementara belum ditemukan studi di tingkat provinsi Indonesia yang menempatkan kinerja keuangan (rasio kemandirian), transparansi anggaran, dan Debt to Income Ratio dalam satu model regresi data panel secara simultan. Kedua, kesenjangan empiris, maksudnya hasil penelitian masih inkonsisten (Agustina et al., 2025) dan (Lhutfi & Sugiharti, 2022) menemukan pengaruh positif kinerja keuangan terhadap Financial Sustainability, sementara (Miftahurrohman & Prasetya, 2024) menemukan pengaruh negatif; pada transparansi anggaran, (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022) menemukan pengaruh positif pada level internasional, namun (Bulan et al., 2023) dan (Saferi & Sari, 2024) menemukan tidak signifikan pada konteks Indonesia. Ketiga, kesenjangan kontekstual, maksudnya mayoritas penelitian di Indonesia dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, padahal pemerintah provinsi memiliki karakteristik fiskal berbeda dan dengan skala anggaran lebih besar dan beban transfer ke kabupaten/kota lebih tinggi (Rosada et al., 2025) sehingga temuan pada tingkat kabupaten/kota tidak dapat digeneralisasi langsung ke tingkat provinsi. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengujian simultan tiga faktor penentu tersebut dalam satu model regresi data panel, menggunakan data terbaru periode 2020-2024 yang mencakup dinamika pasca-pandemi, serta mencakup seluruh 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan pendekatan *purposive sampling*.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan, Transparansi Anggaran, dan Debt to Income Ratio terhadap Financial Sustainability pemerintah provinsi di Indonesia secara parsial; dan (2) bagaimana pengaruh ketiganya secara simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan Agency Theory (Jensen dan Meckling, 1976) sebagai landasan utama untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan, transparansi anggaran, dan DTI terhadap Financial Sustainability pemerintah provinsi di Indonesia. Dalam pandangan ini, masyarakat berperan sebagai principal atau pemberi wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen atau penerima wewenang untuk mengelola keuangan publik. Masalah keagenan muncul ketika principal menghadapi keterbatasan informasi untuk memantau tindakan agen (Eisenhardt, 1989). Kondisi ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan daerah, di mana masyarakat sulit mengawasi seluruh kebijakan fiskal secara langsung. Kinerja keuangan, transparansi anggaran dan DTI merupakan tiga mekanisme yang secara normatif berkontribusi pada penguatan pertanggungjawaban pihak yang menerima wewenang (agen) kepada principal, sehingga ketiganya diprediksi dapat memengaruhi Financial Sustainability.

Neo-Institutional Theory

Selain Agency Theory, penelitian ini memakai Neo-Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977) untuk menjelaskan kondisi ketika praktik tata kelola yang secara normatif baik tidak serta-merta memengaruhi kondisi keuangan. Pemerintah provinsi beroperasi di bawah tekanan regulasi pemerintah pusat (isomorfisme koersif), sehingga sebagian praktik, seperti publikasi laporan keuangan dan pembatasan pinjaman daerah, dapat dijalankan sebagai kepatuhan formal (adopsi seremonial). Agency Theory digunakan untuk menetapkan arah hubungan yang diharapkan, sedangkan Neo-Institutional Theory menjelaskan kondisi yang dapat melemahkan hubungan tersebut.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan rasio kemandirian,

yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019). Rasio kemandirian yang tinggi mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pelayanan publik secara mandiri, dan dalam kerangka Agency Theory menjadi sinyal positif kepada prinsipal bahwa agen mengelola sumber daya secara efisien (Bulan et al., 2023). Begitupun dengan penelitian terdahulu lainnya yang menemukan pengaruh positif dan signifikan rasio kemandirian terhadap Financial Sustainability (Agustina et al., 2025; Lhutfi & Sugiharti, 2022; Miftahurrohman & Prasetya, 2024; Tri Wardhani & Payamta, n.d.).

Transparansi Anggaran

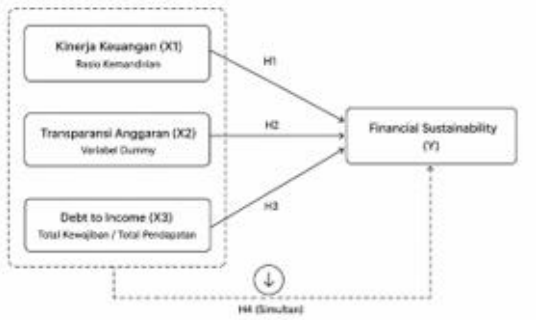
Transparansi Anggaran diukur melalui variabel dummy berdasarkan ketersediaan laporan keuangan pada situs resmi pemerintah daerah (Bulan et al., 2023) dan (Saferi & Sari, 2024). Transparansi berfungsi untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal, mendorong pengawasan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin (Saferi & Sari, 2024). Penelitian (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022) menemukan pengaruh positif dan signifikan transparansi anggaran terhadap Financial Sustainability pada studi lintas negara.

Debt to Income Ratio

DTI diukur melalui perbandingan total kewajiban daerah terhadap total pendapatan daerah (Rosada et al., 2025). Peningkatan utang yang melampaui kapasitas pendapatan merupakan sinyal negatif bagi prinsipal mengenai kualitas pengelolaan agen, sekaligus meningkatkan risiko gagal bayar (Gleißner et al., 2022). Sedangkan beberapa penelitian lain konsisten menemukan pengaruh negatif dan signifikan DTI terhadap Financial Sustainability (Agustina et al., 2025; Rosada et al., 2025; Tri Wardhani & Payamta, n.d.).

Kerangka Pemikiran

Ketiga faktor penentu tersebut, Kinerja Keuangan, Transparansi Anggaran, dan Debt to Income Ratio secara teoritis saling melengkapi dalam kerangka akuntabilitas keagenan, sehingga diduga secara bersama-sama berkontribusi terhadap Financial Sustainability pemerintah provinsi di Indonesia. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Sumber: Data Olahan Penulis

Gambar 1. Kerangka Berpikir

- H1: Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian memiliki pengaruh positif terhadap Financial Sustainability. Kapasitas fiskal yang lebih mandiri mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan menjadi sinyal pengelolaan sumber daya yang baik kepada principal (Bulan et al., 2023).
- H2: Transparansi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Financial Sustainability. Transparansi mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal dan mendorong disiplin anggaran (Saferi & Sari, 2024; Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022). Berdasarkan *Neo-Institutional Theory*, hubungan ini dapat melemah bila transparansi hanya bersifat seremonial; karena itu pengujian ini sekaligus menguji apakah transparansi substantif atau formal.
- H3: *Debt to Income Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *Financial Sustainability*. Beban pinjaman yang tinggi terhadap pendapatan meningkatkan beban bunga dan mempersempit ruang fiskal (Agustina et al., 2025; Rosada et al., 2025; Tri Wardhani & Payamta, n.d.)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, berlandaskan filsafat positivisme (Sugiyono, 2023), untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan, Transparansi Anggaran, dan *Debt to Income Ratio* terhadap Financial Sustainability pada pemerintah provinsi di Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh 34 pemerintah provinsi di Indonesia periode 2020–2024. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) provinsi telah terbentuk sebelum periode penelitian dan tetap ada sepanjang 2020–2024; (2) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah diaudit tersedia untuk seluruh tahun pengamatan. Sejak 2022, jumlah provinsi bertambah dari 34 menjadi 38 dengan dibentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan (UU No. 14, 15, dan 16 Tahun 2022) serta Papua Barat Daya (UU No. 29 Tahun 2022). Keempat provinsi baru tidak dimasukkan karena tidak memiliki data laporan keuangan untuk seluruh periode 2020–2024. Dengan demikian penelitian ini menggunakan panel seimbang 34 provinsi sehingga diperoleh 170 observasi (34 provinsi × 5 tahun). Konsekuensinya, hasil penelitian tidak mencakup provinsi hasil pemekaran dan tidak dapat digeneralisasi langsung pada seluruh 38 provinsi. Karena Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai provinsi induk mengalami perubahan cakupan wilayah sejak 2022, estimasi diulang tanpa kedua provinsi tersebut (32 provinsi, 160 observasi) sebagai uji ketahanan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta situs resmi pemerintah provinsi. Kinerja Keuangan diukur melalui rasio kemandirian, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah dikali seratus persen, di mana semakin tinggi rasio ini mencerminkan semakin besar kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri.

Transparansi Anggaran diukur melalui variabel dummy, dengan nilai satu diberikan apabila pemerintah provinsi menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses publik melalui situs resminya, dan nilai nol apabila informasi tersebut tidak tersedia.

Debt to Income Ratio diukur melalui perbandingan antara total kewajiban daerah dengan total pendapatan daerah dikali seratus persen, yang mencerminkan besarnya beban utang relatif terhadap kapasitas pendapatan.

Financial Sustainability diukur melalui selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional setelah dikurangi pos luar biasa, mengacu pada Laporan Operasional berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Republik Indonesia 71 Tahun 2010, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap laporan keuangan dan publikasi resmi pemerintah. Seluruh data bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi yang telah diaudit BPK RI untuk tahun 2020–2024. Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, pendapatan operasional, beban operasional, dan pinjaman daerah diambil dari laporan yang sama dengan basis akrual (Laporan Operasional dan Neraca) dan dinyatakan dalam rupiah penuh. Seluruh observasi diverifikasi ulang terhadap dokumen LKPD, dan observasi yang tidak memenuhi uji kewajaran (misalnya rasio kemandirian di atas 100 persen) dikoreksi berdasarkan dokumen sumber.

Analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi *EViews* versi 13, di mana *Financial Sustainability* pada provinsi tertentu dan tahun tertentu diregresikan terhadap konstanta ditambah koefisien masing-masing dari Kinerja Keuangan, Transparansi Anggaran, dan *Debt to Income Ratio* pada provinsi dan tahun yang sama, dengan memperhitungkan komponen error. Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange*

Multiplier untuk menentukan model yang paling sesuai di antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini difokuskan pada uji multikolinearitas, mengingat estimasi dengan metode *Generalized Least Squares* pada *Random Effect Mode*l secara inheren mengakomodasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam struktur data panel (Gujarati, 2003). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh masing-masing *Sustainability*, pada taraf signifikansi 0,05. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi *Financial Sustainability*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan 170 observasi yang berasal dari 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Gambaran umum data penelitian diperoleh melalui analisis statistik deskriptif, yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), median, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Financial Sustainability (Y)	1,78E+12	2,96E+11	1,29E+14	(3,86E+12)	1,06E+13
Kinerja Keuangan / Rasio Kemandirian, X1 (%)	86,1006	65,6373	278,5742	6,0416	61,9506
Transparansi Anggaran, X2 (dummy 0/1)	0,6529	1,0000	1,0000	0,0000	0,4774
Debt to Income Ratio, X3 (%)	13,1401	10,8305	50,1825	0,5944	10,1138

Sumber: Data diolah, output EViews 13

Statistik deskriptif dari 170 observasi (34 provinsi, periode 2020-2024) menunjukkan bahwa *Financial Sustainability* memiliki rata-rata surplus operasional sebesar Rp1,78 triliun, dengan rentang dari defisit Rp3,86 triliun hingga surplus Rp129,4 triliun, dan standar deviasi sebesar Rp10,6 triliun yang mencerminkan disparitas kapasitas fiskal antar provinsi. Distribusi variabel ini menunjukkan *skewness* dan *kurtosis* yang jauh melampaui nilai distribusi normal, terutama disebabkan oleh *outlier* atau data yang menyimpang pada provinsi dengan basis PAD sangat besar seperti DKI Jakarta. Meskipun demikian, validitas inferensi statistik tetap terjaga mengingat jumlah observasi yang cukup besar untuk menjamin normalitas asimtotik melalui *Central Limit Theorem*, serta sifat estimator *Generalized Least Squares* yang lebih stabil terhadap ketidaknormalan residual dibandingkan *Ordinary Least Squares* (Gujarati, 2003).

Kinerja Keuangan (rasio kemandirian) memiliki rata-rata 86,10 persen dengan median jauh lebih rendah sebesar 65,64 persen, mengindikasikan bahwa nilai rata-rata terpengaruh signifikan oleh provinsi-provinsi dengan basis PAD tinggi, sementara mayoritas provinsi sesungguhnya berada pada kategori sedang hingga partisipatif menurut klasifikasi (Mahmudi, 2019). Transparansi Anggaran menunjukkan rata-rata 65,29 persen, yang berarti sekitar dua pertiga observasi memenuhi kriteria ketersediaan laporan keuangan pada situs resmi. *Debt to Income Ratio* memiliki rata-rata 13,14 persen dengan variasi moderat antar provinsi.

Tabel 2. Pemilihan Model Estimasi

Uji	Statistik Uji	Probabilitas
Chow (Cross-section Chi-square)	115,3246	0,0000
Hausman (Chi-Sq., d.f. = 3)	7,0356	0,0708
Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (Cross-section)	35,26449	0,0000
Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (Both)	35,90237	0,0000

Sumber: Data diolah, output EViews 13

Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui tiga tahap pengujian. Uji *Chow* menunjukkan probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000, mengindikasikan *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model*. Uji *Hausman* selanjutnya menunjukkan probabilitas sebesar 0,0708, yang berada di atas taraf signifikansi 0,05, sehingga *Random Effect Model* dinyatakan lebih tepat dibandingkan *Fixed Effect Model*. Sebagai konfirmasi tambahan, Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000, yang mengonfirmasi keunggulan *Random Effect Model* dibandingkan *Common Effect Model*. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, *Random Effect Model* dipilih sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	(X1)	(X2)	(X3)
Kinerja Keuangan (X1)	1,0000	0,3469	0,0367
Transparansi Anggaran (X2)	0,3469	1,0000	0,0100
Debt to Income Ratio (X3)	0,0367	0,0100	1,0000

Sumber: Data diolah, output EViews 13

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh koefisien korelasi antar variabel independen berada jauh di bawah ambang batas 0,80, dengan nilai tertinggi hanya sebesar 0,35 antara Kinerja Keuangan dan Transparansi Anggaran, sehingga model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Random Effect Model

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	(8,10E+11)	(0,3488)	0,7277
(X1)	5,12E+10	3,0033	0,0031
(X2)	(1,33E+11)	(0,0676)	0,9462
(X3)	(1,32E+11)	(1,4961)	0,1365
F-statistic	3,6287		0,0143
R-squared	0,0615		
Adjusted R-squared	0,0446		

Sumber: Data diolah, output EViews 13

Hasil estimasi *Random Effect Model* menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan memiliki koefisien positif dengan nilai t-statistik sebesar 3,00 dan probabilitas sebesar 0,0031, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada taraf signifikansi 5 persen. Transparansi Anggaran menunjukkan koefisien negatif dengan t-statistik sebesar -0,07 dan probabilitas sebesar 0,9462, yang berarti tidak berpengaruh signifikan.

Debt to Income Ratio juga menunjukkan koefisien negatif, sesuai arah yang diharapkan secara teoretis, dengan t-statistik sebesar -1,50 dan probabilitas sebesar 0,1365, namun pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistis. Secara simultan, uji F menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 3,63 dengan probabilitas sebesar 0,0143, yang berarti ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*. Nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh sebesar 0,0446, yang berarti ketiga variabel independen hanya mampu menjelaskan sekitar 4,46 persen variasi *Financial Sustainability*, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kondisi ekonomi makro daerah, pola transfer fiskal pusat, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima karena Kinerja Keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan hipotesis kedua (H2) dan ketiga (H3) ditolak karena Transparansi Anggaran dan *Debt to Income Ratio* tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Hipotesis keempat (H4) diterima karena ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Financial Sustainability*.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Financial Sustainability

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan Rasio Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability*,

sejalan dengan ekspektasi teoretis yang dibangun melalui *Agency Theory*, di mana pemerintah daerah sebagai agen dituntut memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menjamin keberlangsungan layanan publik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Provinsi yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara proporsional cenderung mampu menghasilkan surplus operasional yang lebih besar, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap dana transfer pusat yang berubah-ubah menjadi lebih rendah. Temuan ini konsisten dengan (Agustina et al., 2025) dan (Lhutfi & Sugiharti, 2022), namun berbeda dengan (Miftahurrohman & Prasetya, 2024) yang menemukan pengaruh negatif pada konteks pemerintah kota, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik fiskal antara tingkat kota dan provinsi.

Perlu dikemukakan secara transparan bahwa terdapat potensi *mechanical correlation* antara Kinerja Keuangan dan *Financial Sustainability*, mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen pembilang pada rasio kemandirian sekaligus salah satu unsur Pendapatan Operasional dalam formula *Financial Sustainability*. Meskipun demikian, karena

Pendapatan Operasional juga mencakup Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang tidak terkait langsung dengan rasio kemandirian, serta turut dikurangi oleh Beban Operasional yang independen dari Kinerja Keuangan, hubungan yang ditemukan dinilai memiliki dasar substantif yang melampaui sekadar kesamaan komponen konstruksi variabel. Keterbatasan ini tetap diakui sebagai salah satu keterbatasan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi besaran koefisien.

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap *Financial Sustainability*

Transparansi Anggaran tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*. Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Neo-Institutionalism Theory*, khususnya konsep *ceremonial adoption* dan *isomorphism koersif* (DiMaggio dan Powell, 1983; Meyer dan Rowan, 1977). Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah provinsi kemungkinan besar merupakan respons terhadap kewajiban regulasi, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012, bukan cerminan komitmen substansial terhadap prinsip transparansi.

Ketika transparansi dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban formal, dampaknya terhadap kualitas pengelolaan keuangan menjadi minimal dalam jangka pendek. Keterbatasan ini juga dipertegas oleh sifat pengukuran variabel dummy yang hanya menangkap dimensi ketersediaan formal, bukan kualitas, kelengkapan, atau ketepatan waktu penyampaian informasi. Temuan ini konsisten dengan (Bulan et al., 2023) dan (Saferi & Sari, 2024) yang juga menemukan ketidaksignifikanan transparansi anggaran pada konteks Indonesia.

Pengaruh *Debt to Income Ratio* terhadap *Financial Sustainability*

Debt to Income Ratio menunjukkan arah koefisien negatif yang sesuai ekspektasi teoretis, namun tidak signifikan secara statistis. Penjelasan atas temuan ini dapat dilihat dari perspektif *Neo-Institutionalism Theory*, di mana pengelolaan utang daerah sangat dipengaruhi oleh *isomorphism koersif* dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 yang membatasi kumulatif pinjaman daerah maksimal 75 persen dari total penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Keseragaman tekanan regulasi ini menyebabkan variasi *Debt to Income Ratio* antar provinsi menjadi relatif terbatas, sehingga dampak statistisnya sulit terdeteksi.

Data sekunder mengindikasikan bahwa dari sekitar 450 pemerintah daerah yang secara regulasi memenuhi syarat mengakses pinjaman daerah, hanya sekitar 21 daerah yang benar-benar memanfaatkannya (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2024). Dari perspektif teknis, rata-rata *Debt to Income Ratio* pemerintah provinsi selama periode

penelitian hanya sebesar 13,14 persen, jauh di bawah ambang batas yang berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal, sementara pembayaran pokok dan bunga utang tercatat dalam pos pembiayaan yang terpisah dari Laporan Operasional yang menjadi basis pengukuran *Financial Sustainability*. Hasil ini berbeda dari (Agustina et al., 2025) dan (Tri Wardhani & Payamta, n.d.), kemungkinan disebabkan perbedaan periode regulasi atau unit observasi.

Pengaruh Simultan terhadap *Financial Sustainability*

Ketiga variabel independen secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*, meskipun secara parsial hanya Kinerja Keuangan yang signifikan. Kondisi ini merupakan fenomena statistik yang valid, di mana signifikansi uji F dapat terjadi ketika salah satu variabel memiliki pengaruh dominan meskipun variabel lain secara individual tidak melampaui ambang signifikansi (Gujarati, 2003).

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 4,46 persen menunjukkan bahwa meskipun model secara statistis layak, ketiga variabel hanya menjelaskan sebagian kecil variasi *Financial Sustainability*, mengindikasikan keberadaan faktor struktural lain seperti kondisi ekonomi makro dan kualitas tata kelola yang memiliki daya penjelas lebih besar dan perlu diintegrasikan dalam penelitian lanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian regresi data panel terhadap 170 observasi dari 34 pemerintah provinsi yang konsisten sepanjang periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Sustainability (H1 diterima), sedangkan Transparansi Anggaran dan Debt to Income Ratio tidak berpengaruh signifikan secara parsial (H2 dan H3 ditolak). Secara simultan, ketiga variabel tersebut tetap berpengaruh signifikan terhadap Financial Sustainability (H4 diterima), meskipun nilai Adjusted R-squared yang rendah (4,46 persen) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi Financial Sustainability dijelaskan oleh faktor di luar model, seperti kondisi ekonomi makro dan kualitas tata kelola.

Secara praktis, pemerintah provinsi disarankan memprioritaskan penguatan Pendapatan Asli Daerah sebagai strategi utama Financial Sustainability, sementara Kementerian Dalam Negeri disarankan memperkuat regulasi transparansi anggaran agar menekankan kualitas dan substansi informasi, bukan sekadar kepatuhan formal atas ketersediaan dokumen.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada rendahnya daya penjelas model, pengukuran Transparansi Anggaran yang hanya berupa variabel dummy, serta potensi mechanical correlation antara Kinerja Keuangan dan Financial Sustainability akibat penggunaan komponen Pendapatan Asli Daerah pada kedua variabel. Dan, sampel tidak mencakup empat provinsi hasil pemekaran 2022, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada seluruh 38 provinsi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indeks transparansi yang lebih komprehensif, proksi kinerja keuangan yang lebih independen, serta mengintegrasikan variabel kondisi ekonomi makro dan kualitas tata kelola.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan. Pertama, mengingat Kinerja Keuangan terbukti menjadi determinan *utama Financial Sustainability*, pemerintah provinsi disarankan memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, serta penguatan kinerja BUMD, guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Kedua, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi disarankan meningkatkan kualitas transparansi anggaran melampaui pemenuhan kewajiban formal, dengan memastikan informasi keuangan yang dipublikasikan lengkap, mudah

dipahami, dan tepat waktu, guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas model dengan variabel lain yang berpotensi memiliki daya penjelas lebih besar (seperti pertumbuhan PDRB per kapita atau kualitas tata kelola pemerintahan) serta menggunakan indeks transparansi anggaran yang lebih komprehensif dibandingkan variabel dummy biner.

6. REFERENSI

Agustina, S., Dwitayanti, Y., & Berlianti, M. (2025). *Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Utang Pada Pendapatan Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera*.

Bulan, T. T., Diswandi, & I Nyoman, N. A. P. (2023). Determinants Of Budget Transparency Toward Financial Sustainability. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, *139*(7), 98–113. https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-07.11

Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2022). Budget transparency and financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, *34*(6), 210–234. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025

Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. *Journal of Business Economics*, *92*(3), 467–516. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01081-0

Gujarati, D. N. . (2003). *Basic econometrics*. McGraw Hill.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal Economics, 3(4), of Financial 305–360.

Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial Sustainability Of Local Governments In Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *14*(1), 159–170. https://doi.org/10.17509/jurnal

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (keempat).

Miftahurrohman, A., & Prasetya, B. P. (2024). *Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan terhadap Keberlanjutan Keuangan (Financial Sustainability) pada Pemerintah Kota Yogyakarta* (Vol. 7, Number 2).

PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. (2010).

Rosada, A., Aprianti, S., & Choiruddin. (2025). Financial Sustainability pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. In *Peringkat Akreditasi Sinta* (Vol. 24, Number 2).

Saferi, D. M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Budget Transparency dan Fiscal Autonomy terhadap Financial Sustainability: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, *6*(3), 1182–1196. https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1600

Tri Wardhani, D., & Payamta. (n.d.). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability Pada Sektor Pemerintah. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4, Number 1). Retrieved http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka